

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian mengenai pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 1994-2010 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Utara (Y) selama tahun pengamatan 1994-2010 adalah : realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Angkatan Kerja (AK) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (EXPD). Hasil analisis mengenai pengaruh PMA, PMDN, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah (EXPD) daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Utara menunjukkan hubungan yang positif tetapi ada beberapa variabel yang belum signifikan nilai probabilitasnya dengan  $\alpha=0,05$ , yaitu Pengeluaran Pemerintah (EXPD), sedangkan nilai Probabilitas AK, PMA dan PMDN masih jauh dibawah  $\alpha=0,05$ .
- Dari hasil analisis diatas bahwa diantara variabel independen ( PMA, PMDN, AK dan EXPD) yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara adalah faktor pertumbuhan tenaga kerja maka dari itu pemerintah Sumatera Utara harus memikirkan bagaimana strategi meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif sehingga bisa meningkatkan pertumbuhannya ekonominya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan hasil penelitian, beberapa upaya perlu dilakukan untuk menggerakkan pembangunan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara antara lain :

1. Meskipun secara kuantitas angkatan kerja memberi kontribusi yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Utara, seyogyanya disertai dengan upaya peningkatan kualitas angkatan kerja oleh pemerintah daerah, misalnya dengan memperbanyak pendidikan kewirausahaan melalui jalur non formal.
2. Peranan PMA dan PMDN sesuai dengan semangat otonomi daerah harus dipacu dengan peningkatan situasi kondusif berinvestasi, pembuatan peta potensi daerah dan pembentukan unit pelayanan terpadu di daerah untuk mempermudah pelayanan pembuatan ijin usaha dan investasi, contoh seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok di Sumatera Barat dan Sragen di Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara diharapkan mengalokasikan belanja daerah secara proporsional antara belanja rutin yang konsumtif dengan belanja pembangunan yang lebih memihak kepentingan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.